

Ketidaksimetrian Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah: Analisis Postur APBD Se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Adriansyah^{1✉}, Andi Faisal², Yulia Yunita Yusuf³

1 Program Studi Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Makassar

2 Program Studi Akuntansi Terapan, Universitas Negeri Makassar

3 Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) se-Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 dalam perspektif kinerja realisasi anggaran, kemandirian fiskal, dan kualitas struktur belanja daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) pada 25 pemerintah daerah. Teknik analisis meliputi rasio realisasi pendapatan dan belanja, struktur pendapatan, struktur belanja, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio transfer, serta surplus/defisit realisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai Rp43,00 triliun atau 89,99% dari anggaran, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai Rp39,20 triliun atau 81,25%. Kondisi tersebut menghasilkan surplus realisasi sebesar Rp3,80 triliun, meskipun postur anggaran menunjukkan defisit Rp470,03 miliar. Struktur pendapatan masih didominasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 67,60%, sementara PAD hanya berkontribusi 27,37%. Pada sisi belanja, belanja pegawai mendominasi sebesar 45,32%, sedangkan belanja modal hanya 11,27%. Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksimetrian realisasi APBD dan terbatasnya ruang fiskal untuk belanja produktif.

Kata Kunci: APBD; realisasi anggaran; PAD; TKDD; belanja modal.

Abstract

This study aims to analyze the posture of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) across South Sulawesi Province in 2025 from the perspective of budget realization performance, fiscal independence, and the quality of regional expenditure structure. This study employs a descriptive quantitative approach using secondary data obtained from the Regional Financial Information System (SIKD) covering 25 local governments. The analytical techniques include revenue and expenditure realization ratios, revenue structure analysis, expenditure structure analysis, the local own-source revenue ratio, the transfer ratio, and realized surplus/deficit analysis. The findings show that regional revenue realization reached IDR 43.00 trillion, or 89.99% of the budget, while regional expenditure realization reached IDR 39.20 trillion, or 81.25%. This condition resulted in a realized surplus of IDR 3.80 trillion, although the budget posture initially showed a deficit of IDR 470.03 billion. The revenue structure was still dominated by Transfers to Regions and Village Funds (TKDD), accounting for 67.60%, while local own-source revenue contributed only 27.37%. On the expenditure side, personnel expenditure dominated at 45.32%, whereas capital expenditure accounted for only 11.27%.

These findings indicate an asymmetry in APBD realization and limited fiscal space for productive spending.

Keywords: *content; formatting; article.*

Copyright (c) 2026 Adriansyah

✉ Corresponding author : Adriansyah

Email Address : adriansyah@unm.ac.id (Jl. Ance Dg. Ngoyo Lr 2 No. 5)

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam alokasi fiskal yang terukur. APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan tahunan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang mencerminkan pilihan pembangunan, kapasitas fiskal, dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik (Mardiasmo, 2021; Rubin, 2019). Dalam konteks desentralisasi fiskal, APBD menjadi ruang strategis tempat pemerintah daerah menyeimbangkan kewenangan, kebutuhan pelayanan publik, serta keterbatasan sumber pembiayaan daerah (Wildavsky dan Caiden, 2004; Lewis, 2023).

Kerangka pengelolaan APBD di Indonesia diatur melalui PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pedoman teknis penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur melalui Permendagri Nomor 15 Tahun 2024. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, analisis terhadap postur dan realisasi APBD penting dilakukan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengubah rencana anggaran menjadi kinerja fiskal yang nyata.

Salah satu persoalan penting dalam pengelolaan APBD adalah ketidakseimbangan antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Realisasi pendapatan yang tinggi tidak selalu diikuti oleh kemampuan belanja yang optimal. Dalam kondisi tertentu, realisasi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja dapat menghasilkan surplus realisasi. Namun, surplus tersebut tidak selalu mencerminkan efisiensi fiskal, karena dapat pula menunjukkan keterlambatan pelaksanaan program, kendala pengadaan, atau rendahnya kapasitas pelaksanaan anggaran (Schick, 2007; Said, 2025; Lubis dkk., 2025).

Selain persoalan realisasi, struktur pendapatan daerah juga menjadi isu penting. Banyak pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut dapat membantu pembiayaan layanan publik dasar, tetapi pada saat yang sama dapat membatasi fleksibilitas fiskal daerah dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Lewis, 2023; Wardhana, 2025). Oleh karena itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan perlu dianalisis sebagai indikator awal kemandirian fiskal daerah (Halim, 2019; Mahmudi, 2019).

Pada sisi belanja, kualitas APBD tidak hanya dinilai dari besarnya serapan, tetapi juga dari komposisi belanja. Belanja pegawai yang terlalu dominan dapat mempersempit ruang fiskal untuk belanja produktif, sedangkan belanja modal memiliki peran penting dalam pembentukan aset daerah, pembangunan

infrastruktur, dan peningkatan layanan publik (Darwanto dan Yustikasari, 2007; OECD, 2015). Literatur penganggaran publik menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang menghadapi tekanan fiskal sering kali melakukan penyesuaian belanja yang berdampak pada penurunan investasi publik dan penciptaan nilai publik (Cepiku dkk., 2016; Raudla dkk., 2017).

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, analisis terhadap postur APBD se-Provinsi Sulawesi Selatan penting dilakukan untuk memotret kapasitas fiskal daerah secara agregat. Data SIKD tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat 25 pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang datanya diterima dalam postur APBD. Data tersebut memberikan dasar empiris untuk menganalisis struktur pendapatan, struktur belanja, realisasi anggaran, dan surplus/defisit APBD pada level agregat.

Penelitian terdahulu umumnya menganalisis APBD pada satu pemerintah daerah, seperti Kabupaten Gowa atau Kota Makassar, atau menggunakan periode historis sebelum tahun 2025 (Said, 2025; Ningrat, 2025). Kajian yang secara khusus memotret postur APBD se-Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 berbasis data SIKD dengan fokus pada ketidaksimetrian realisasi pendapatan dan belanja masih terbatas. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis postur APBD se-Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025, khususnya struktur pendapatan, struktur belanja, tingkat realisasi, dan implikasi fiskalnya terhadap kemandirian serta kualitas belanja daerah.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hubungan kausal, melainkan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan struktur APBD, capaian realisasi anggaran, serta implikasi fiskal dari data anggaran yang tersedia. Penelitian deskriptif berbasis data sekunder relevan digunakan dalam kajian kinerja APBD karena mampu menunjukkan pola, proporsi, dan titik kritis pengelolaan keuangan daerah (Mahmudi, 2019; Said, 2025).

Data penelitian bersumber dari postur APBD se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 yang diperoleh melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan/atau portal data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Data mencakup 25 pemerintah daerah dan meliputi akun pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pendapatan lainnya, belanja daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja lainnya, serta pembiayaan daerah.

Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis struktur, analisis rasio, dan analisis surplus/defisit. Analisis struktur digunakan untuk mengetahui kontribusi masing-masing komponen terhadap total pendapatan atau total belanja. Analisis rasio digunakan untuk mengukur capaian realisasi pendapatan dan belanja, rasio PAD terhadap total pendapatan, rasio TKDD terhadap total pendapatan, serta rasio belanja modal terhadap total belanja. Analisis surplus/defisit digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah.

Rumus utama yang digunakan adalah: (1) Rasio Realisasi Pendapatan = $\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$; (2) Rasio Realisasi Belanja = $\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$; (3) Rasio PAD = $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total}}$

Realisasi Pendapatan $\times 100\%$; (4) Rasio TKDD = Realisasi TKDD / Total Realisasi Pendapatan $\times 100\%$; (5) Rasio Belanja Modal = Realisasi Belanja Modal / Total Realisasi Belanja $\times 100\%$; dan (6) Surplus/Defisit Realisasi = Realisasi Pendapatan Daerah - Realisasi Belanja Daerah.

Sebelum dianalisis, data dibersihkan dengan mengidentifikasi akun belanja yang muncul ganda, khususnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Akun ganda tersebut tidak dihitung ulang agar tidak terjadi duplikasi nilai. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data agregat, sehingga penelitian belum menjelaskan variasi antar-kabupaten/kota secara individual. Namun, pendekatan agregat tetap relevan untuk memotret pola umum postur fiskal se-Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ringkasan Kinerja Realisasi APBD

Kinerja APBD se-Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 menunjukkan adanya perbedaan capaian antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Ringkasan indikator utama disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Kinerja Realisasi APBD Se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Indikator	Anggaran	Realisasi	Capaian/Rasio	Makna Analitis
Pendapatan Daerah	Rp47,78 T	Rp43,00 T	89,99%	Realisasi pendapatan mendekati 90%, menunjukkan mobilisasi pendapatan relatif kuat.
Belanja Daerah	Rp48,25 T	Rp39,20 T	81,25%	Serapan belanja lebih rendah dibandingkan pendapatan, mengindikasikan ketidaksimetrian realisasi.
Surplus/Defisit Anggaran	Defisit Rp470,03 M	Surplus Rp3,80 T	-	Terjadi perubahan dari defisit anggaran menjadi surplus realisasi akibat belanja tidak terserap penuh.
Pembiayaan Daerah	Rp470,03 M	Rp555,94 M	118,28%	Pembiayaan terealisasi di atas anggaran dan masih bertumpu pada SiLPA.

Sumber: Data APBD se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 melalui SIKD/DJPK, diolah penulis. Rujukan interpretasi: PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 15 Tahun 2024; Mardiasmo (2021).

Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai 89,99%, sedangkan realisasi belanja hanya 81,25%. Selisih capaian ini menjadi dasar utama argumentasi penelitian, yaitu adanya ketidaksimetrian realisasi APBD. Dalam kerangka penganggaran publik, ketidaksimetrian tersebut perlu ditafsirkan secara hati-hati. Di satu sisi, realisasi pendapatan yang relatif tinggi menunjukkan kemampuan daerah dalam mengumpulkan penerimaan. Namun, di sisi lain, realisasi belanja yang lebih rendah dapat menandakan hambatan pelaksanaan program, terutama jika terjadi pada belanja yang memiliki dampak pembangunan langsung (Schick, 2007; Lubis dkk., 2025).

Struktur Pendapatan Daerah dan Ketergantungan Fiskal

Struktur pendapatan daerah menunjukkan sumber utama pembiayaan APBD. Komposisi pendapatan menjadi indikator penting untuk melihat derajat kemandirian fiskal daerah dan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

Tabel 2. Struktur Pendapatan Daerah dan Ketergantungan Fiskal

Komponen Pendapatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Kontribusi thd Pendapatan Realisasi	Makna Analitis
PAD	Rp12,59 T	Rp11,77 T	93,48%	27,37%	Realisasi PAD relatif baik, tetapi kontribusinya belum dominan.
TKDD	Rp32,48 T	Rp29,07 T	89,49%	67,60%	Sumber pendapatan terbesar; menandakan ketergantungan fiskal yang tinggi.
Pendapatan Lainnya	Rp2,71 T	Rp2,16 T	79,90%	5,03%	Kontribusi relatif kecil dan realisasinya di bawah pendapatan utama.
Total Pendapatan	Rp47,78 T	Rp43,00 T	89,99%	100,00%	Capaian total pendapatan ditopang oleh PAD dan TKDD.

Sumber: Data APBD se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 melalui SIKD/DJPK, diolah penulis. Rujukan interpretasi: Halim (2019), Lewis (2023), Wardhana (2025).

Tabel 2 memperlihatkan bahwa TKDD menyumbang 67,60% dari total realisasi pendapatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur pendapatan daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan masih bertumpu pada transfer pemerintah pusat. Temuan ini konsisten dengan Lewis (2023) yang menjelaskan bahwa kerangka baru desentralisasi fiskal Indonesia tetap menempatkan transfer dan instrumen kendali pusat sebagai komponen penting dalam hubungan keuangan pusat-daerah. Dalam perspektif kemandirian fiskal, kontribusi PAD sebesar 27,37% menunjukkan adanya kapasitas pendapatan internal, tetapi belum cukup untuk menjadi basis dominan pembiayaan daerah (Halim, 2019; Wardhana, 2025).

Ketergantungan terhadap TKDD memiliki implikasi ganda. Pertama, transfer pusat membantu menjaga kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pelayanan publik. Kedua, dominasi transfer dapat membatasi fleksibilitas fiskal daerah, terutama ketika prioritas transfer memiliki ketentuan penggunaan tertentu. Oleh karena itu, strategi peningkatan PAD tetap penting, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga untuk memperbesar ruang diskresi daerah dalam menentukan prioritas pembangunan (Mardiasmo, 2021; Hasanah, 2025).

Struktur PAD dan Kualitas Proyeksi Pendapatan

Tabel 3. Struktur PAD dan Kualitas Proyeksi Pendapatan Internal Daerah

Komponen PAD	Anggaran	Realisasi	Capaian	Kontribusi thd PAD	Interpretasi
Pajak Daerah	Rp8,44 T	Rp7,10 T	84,11%	60,32%	Basis utama PAD, tetapi realisasi masih dapat dioptimalkan.
Retribusi Daerah	Rp2,41 T	Rp2,18 T	90,56%	18,54%	Capaian relatif baik dengan kontribusi menengah.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp0,47 T	Rp0,41 T	86,69%	3,50%	Kontribusi kecil terhadap PAD.

Lain-lain PAD yang Sah	Rp1,26 T	Rp2,08 T	164,13%	17,64%	Realisasi melampaui target; menunjukkan potensi pendapatan yang belum diproyeksi akurat.
Total PAD	Rp12,59 T	Rp11,77 T	93,48%	100,00%	PAD cukup efektif dari sisi capaian target, tetapi belum dominan dalam pendapatan daerah.

Sumber: Data APBD se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 melalui SIKD/DJPK, diolah penulis. Rujukan interpretasi: Halim (2019), Mahmudi (2019), Hasanah (2025).

Tabel 3 menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen utama PAD dengan kontribusi 60,32% terhadap total realisasi PAD. Namun, capaian realisasi pajak daerah hanya 84,11%, sehingga masih terdapat ruang optimalisasi melalui perbaikan basis data pajak, intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi administrasi pendapatan. Retribusi daerah menunjukkan capaian 90,56%, tetapi kontribusinya terhadap PAD masih jauh di bawah pajak daerah.

Temuan yang perlu mendapat perhatian adalah realisasi lain-lain PAD yang sah sebesar 164,13% dari anggaran. Realisasi yang jauh melampaui target dapat ditafsirkan sebagai indikator adanya potensi pendapatan yang belum diproyeksikan secara memadai pada tahap penyusunan APBD. Dalam konteks perencanaan keuangan daerah, hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas estimasi pendapatan agar target APBD tidak terlalu konservatif atau tidak mencerminkan potensi riil daerah (Mahmudi, 2019; Mardiasmo, 2021).

Struktur Belanja Daerah dan Ruang Fiskal Belanja Produktif

Tabel 4. Struktur Belanja Daerah dan Ruang Fiskal Belanja Produktif

Komponen Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian	Kontribusi thd Belanja Realisasi	Makna Analitis
Belanja Pegawai	Rp20,54 T	Rp17,77 T	86,49%	45,32%	Komponen terbesar; menunjukkan dominasi belanja rutin.
Belanja Barang dan Jasa	Rp13,56 T	Rp10,31 T	76,02%	26,29%	Serapan menengah; berkaitan dengan operasional program.
Belanja Modal	Rp6,30 T	Rp4,42 T	70,16%	11,27%	Proporsi dan serapan rendah; berisiko membatasi belanja produktif.
Belanja Lainnya	Rp7,85 T	Rp6,71 T	85,49%	17,11%	Terdiri atas bagi hasil, bantuan keuangan, hibah, bansos, bunga, subsidi, dan BTT.
Total Belanja	Rp48,25 T	Rp39,20 T	81,25%	100,00%	Serapan belanja lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan.

Sumber: Data APBD se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 melalui SIKD/DJPK, diolah penulis. Rujukan interpretasi: Darwanto dan Yustikasari (2007), OECD (2015), Raudla dkk. (2017), Cepiku dkk. (2016).

Tabel 4 menunjukkan bahwa belanja pegawai mendominasi struktur belanja daerah dengan proporsi 45,32% dari total realisasi belanja. Dominasi belanja pegawai menggambarkan besarnya beban belanja rutin dalam APBD. Meskipun belanja pegawai merupakan kebutuhan operasional pemerintahan, proporsi yang besar dapat mempersempit ruang fiskal untuk belanja yang lebih produktif. Literatur fiskal daerah menjelaskan bahwa tekanan belanja rutin

dapat menimbulkan crowding out terhadap belanja pembangunan, terutama belanja modal (Cepiku dkk., 2016; Raudla dkk., 2017).

Belanja modal hanya berkontribusi 11,27% terhadap total realisasi belanja. Proporsi ini relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Darwanto dan Yustikasari (2007) menegaskan bahwa belanja modal berhubungan dengan kapasitas pembangunan daerah, sedangkan OECD (2015) menekankan pentingnya tata kelola investasi publik lintas level pemerintahan agar belanja modal menghasilkan dampak jangka panjang. Dengan demikian, rendahnya proporsi belanja modal di Sulawesi Selatan tahun 2025 menjadi titik kritis kualitas belanja daerah.

Titik Kritis Serapan Belanja

Tabel 5. Titik Kritis Serapan Belanja dan Argumentasi Pembahasan

Komponen	Capaian Realisasi	Status Analitis	Kemungkinan Isu	Implikasi Kebijakan
Belanja Tidak Terduga	15,51%	Sangat rendah	Bersifat kontinjensi dan hanya digunakan untuk kebutuhan darurat.	Perlu evaluasi kewajaran alokasi dan mekanisme aktivasi belanja darurat.
Belanja Hibah	68,17%	Rendah	Kemungkinan terkait persyaratan administrasi, verifikasi penerima, dan waktu pencairan.	Perlu perbaikan tata kelola hibah dan jadwal pelaksanaan.
Belanja Modal	70,16%	Rendah	Kemungkinan hambatan pengadaan, kesiapan dokumen teknis, dan keterlambatan pelaksanaan fisik.	Perlu percepatan perencanaan, pengadaan, dan pengendalian proyek.
Belanja Barang dan Jasa	76,02%	Menengah	Serapan belum optimal pada komponen operasional program.	Perlu monitoring realisasi program sejak awal tahun.
Belanja Bantuan Sosial	112,41%	Melebihi target	Kebutuhan sosial melebihi estimasi awal.	Perlu perencanaan berbasis data penerima dan risiko sosial.

Sumber: Data APBD se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 melalui SIKD/DJPK, diolah penulis. Rujukan interpretasi: Schick (2007), OECD (2015), Ningrat (2025), Lubis dkk. (2025).

Tabel 5 mengidentifikasi beberapa komponen belanja yang menjadi titik kritis. Belanja modal dan belanja hibah memiliki serapan relatif rendah, sedangkan belanja bantuan sosial melampaui anggaran. Pola ini menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan APBD tidak hanya terletak pada kemampuan menyerap anggaran, tetapi juga pada kualitas perencanaan dan ketepatan estimasi kebutuhan. Schick (2007) menekankan bahwa informasi kinerja dan data anggaran seharusnya digunakan sebagai alat analitis dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar sebagai dokumen administratif.

Rendahnya serapan belanja modal sangat penting karena belanja modal berkaitan langsung dengan pengadaan aset dan pembangunan infrastruktur. Penelitian Sugi dkk. (2024) menunjukkan bahwa belanja modal berhubungan dengan kinerja keuangan daerah, sementara Hidayat dkk. (2024) menemukan bahwa ketergantungan fiskal dapat berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Dengan demikian, rendahnya serapan belanja modal

di Sulawesi Selatan memperkuat indikasi bahwa ruang fiskal produktif belum sepenuhnya optimal.

Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah

Tabel 6. Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah

Indikator	Anggaran	Realisasi	Capaian	Interpretasi
Surplus/Defisit	Defisit Rp470,03 M	Surplus Rp3,80 T	-	Surplus realisasi terjadi karena belanja terserap lebih rendah daripada pendapatan.
Pembiayaan Daerah	Rp470,03 M	Rp555,94 M	118,28%	Pembiayaan terealisasi melebihi anggaran.
Penerimaan Pembiayaan	Rp944,36 M	Rp1,00 T	106,04%	Seluruhnya berasal dari SiLPA.
Pengeluaran Pembiayaan	Rp474,33 M	Rp445,44 M	93,91%	Pengeluaran pembiayaan tidak terserap penuh.

Sumber: Data APBD se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 melalui SIKD/DJPK, diolah penulis. Rujukan interpretasi: PP No. 12 Tahun 2019, Salamaliki dan Venetis (2024), Mahmudi (2019).

Tabel 6 menunjukkan perubahan postur dari defisit anggaran menjadi surplus realisasi. Dalam anggaran, belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah sehingga terdapat defisit Rp470,03 miliar. Namun, realisasi menunjukkan pendapatan lebih besar daripada belanja sehingga terjadi surplus Rp3,80 triliun. Kondisi ini dapat dibaca sebagai kehati-hatian fiskal, tetapi juga dapat menjadi sinyal belum optimalnya pelaksanaan belanja, terutama belanja modal dan belanja barang/jasa.

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA menunjukkan bahwa sisa anggaran tahun sebelumnya masih menjadi instrumen penting dalam pembiayaan APBD. SiLPA tidak selalu negatif, tetapi jika berulang dalam jumlah besar, hal tersebut perlu dikaitkan dengan kualitas perencanaan dan realisasi belanja. Salamaliki dan Venetis (2024) menjelaskan bahwa ruang fiskal perlu dikelola agar pemerintah mampu merespons kebutuhan kebijakan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal. Dalam konteks ini, SiLPA perlu diarahkan untuk memperkuat belanja produktif, bukan sekadar menjadi sisa anggaran yang berulang.

Sintesis Temuan dan Posisi Artikel

Tabel 7. Matriks Temuan Utama, Sintesis Literatur, dan Arah Pembahasan

Temuan Empiris	Interpretasi	Dukungan Literatur	Arah Implikasi
Pendapatan terealisasi 89,99%, belanja 81,25%.	Terdapat ketidaksimetrian realisasi APBD.	Schick (2007); Said (2025); Lubis dkk. (2025).	Perlu penguatan kapasitas pelaksanaan belanja.
TKDD berkontribusi 67,60% terhadap pendapatan.	Ketergantungan fiskal masih tinggi.	Lewis (2023); Wardhana (2025); Halim (2019).	Perlu optimalisasi PAD dan diversifikasi pendapatan.
Belanja pegawai mencapai 45,32% dari realisasi belanja.	Belanja rutin mendominasi struktur APBD.	Mardiasmo (2021); Cepiku dkk. (2016); Raudla dkk. (2017).	Perlu efisiensi belanja operasional.
Belanja modal hanya 11,27% dan serapannya 70,16%.	Ruang fiskal produktif terbatas.	Darwanto dan Yustikasari (2007); OECD (2015); Sugi dkk. (2024).	Perlu percepatan belanja modal dan prioritas investasi publik.
Lain-lain PAD yang sah terealisasi 164,13%.	Proyeksi pendapatan belum sepenuhnya akurat.	Mahmudi (2019); Mardiasmo (2021).	Perlu perbaikan basis data dan peramalan pendapatan.

Sumber: Disusun penulis berdasarkan hasil olah data APBD se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dan sintesis literatur.

Tabel 7 menegaskan bahwa kontribusi utama artikel ini terletak pada pembacaan simultan antara realisasi pendapatan, struktur pendapatan, struktur belanja, dan surplus/defisit. Berbeda dari penelitian yang hanya menilai efektivitas pendapatan atau efisiensi belanja pada satu pemerintah daerah, artikel ini memotret postur fiskal agregat 25 pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025. Dengan demikian, kebaruan artikel ini bukan pada penggunaan rasio APBD semata, melainkan pada fokus empiris terhadap ketidaksimetrian realisasi pendapatan-belanja dan implikasinya terhadap kualitas belanja produktif.

Jika dibandingkan dengan Said (2025) yang mengkaji Kabupaten Gowa, artikel ini memiliki cakupan yang lebih luas karena menggunakan agregat 25 pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan Ningrat (2025) yang membahas Kota Makassar tahun 2024, artikel ini menggunakan data tahun 2025 dan memotret struktur fiskal provinsi secara agregat. Dengan demikian, artikel ini dapat diposisikan sebagai kajian deskriptif-analitis berbasis data terbaru yang relevan bagi evaluasi kebijakan fiskal daerah.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa postur APBD se-Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 ditandai oleh ketidaksimetrian realisasi pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp43,00 triliun atau 89,99% dari anggaran, sedangkan realisasi belanja daerah hanya mencapai Rp39,20 triliun atau 81,25%. Perbedaan tersebut menghasilkan surplus realisasi sebesar Rp3,80 triliun, meskipun postur anggaran awal menunjukkan defisit Rp470,03 miliar.

Struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh TKDD sebesar 67,60% dari total realisasi pendapatan, sementara PAD berkontribusi sebesar 27,37%. Temuan ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih perlu diperkuat. Pada sisi belanja, belanja pegawai menjadi komponen dominan sebesar 45,32% dari total realisasi belanja, sedangkan belanja modal hanya sebesar 11,27%. Selain itu, serapan belanja modal hanya mencapai 70,16%, lebih rendah daripada realisasi belanja daerah secara keseluruhan.

Implikasi utama penelitian ini adalah perlunya penguatan kualitas penganggaran daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan akurasi proyeksi pendapatan, memperluas basis PAD, memperbaiki tata kelola belanja modal, serta mempercepat pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran. Surplus realisasi perlu dimaknai bukan hanya sebagai indikasi kehati-hatian fiskal, tetapi juga sebagai sinyal untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan belanja.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data agregat sehingga belum menjelaskan variasi antar-kabupaten/kota. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis komparatif antar-daerah atau menggunakan data panel beberapa tahun untuk menilai tren kemandirian fiskal, kualitas belanja, dan konsistensi realisasi APBD di Sulawesi Selatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada penyedia data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

Referensi :

Daftar Pustaka / Referensi menggunakan Konsep APA Style. Contoh APA Style menggunakan Aplikasi Mendeley:

- Anynda, N. S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(10).
- Cepiku, D., Mussari, R., & Giordano, F. (2016). Local governments managing austerity: Approaches, determinants and impact. *Public Administration*, 94(1), 223-243. <https://doi.org/10.1111/padm.12222>
- Darwanto, & Yustikasari, Y. (2007). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). Portal Data APBD. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Halim, A. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Hasanah, N. (2025). Empirical evidence on the role of local own-source revenue in strengthening regional fiscal capacity. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*.
- Hidayat, T., Permatasari, M. D., & Aeni, N. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal. *AKUBIS: Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(1), 105-115. <https://doi.org/10.37366/akubis.v9i01.1818>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Lewis, B. D. (2023). Indonesia's new fiscal decentralisation law: A critical assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 1-28. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>
- Lubis, P. K. D., dkk. (2025). Pengaruh realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi.
- Ningrat, R. R. P. (2025). Efektivitas realisasi anggaran publik di Kota Makassar: Kajian kritis manajemen keuangan daerah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2015). *Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across Levels of Government*. OECD Publishing.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Raudla, R., Douglas, J. W., Randma-Liiv, T., & Savi, R. (2017). Fiscal crisis and expenditure cuts: The influence of public management practices on cutback strategies in Europe. *American Review of Public Administration*, 47(3), 376-394. <https://doi.org/10.1177/0275074016661029>
- Rubin, I. S. (2019). *Public Budgeting Systems: Politics, Policy, Process* (9th ed.). CQ Press.
- Said, S. N. R. (2025). Analisis kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Gowa. *Advances in Management & Financial Reporting*.

- Salamaliki, P. K., & Venetis, I. A. (2024). Fiscal space and policy response to financial crises: Market access and deficit concerns. *Open Economies Review*, 35(2), 323-361.
- Schick, A. (2007). Performance budgeting and accrual budgeting: Decision rules or analytic tools? *OECD Journal on Budgeting*, 7(2), 109-138. <https://doi.org/10.1787/budget-v7-art11-en>
- Sugi, L. P. M. W., dkk. (2024). PAD, dana transfer ke daerah, dan belanja modal memengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten di wilayah Flores Provinsi NTT. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Wardhana, D. (2025). Decentralisation and distribution: Fiscal decentralisation and spatial disparities in Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*.
- Wildavsky, A., & Caiden, N. (2004). *The New Politics of the Budgetary Process* (5th ed.). Pearson.